



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 89 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN CILAWU TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CILAWU TAHUN 2023.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

### **BAB II**

#### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

##### **Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

##### **Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 89**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 89 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KECAMATAN  
TAHUN 2023**

**KERJA  
CILAWU**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.



Kecamatan Cilawu sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Cilawu telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tema Pembangunan Tahun 2023 berdasarkan RKPD Tahun 2023 yaitu **“Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal

tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan <sup>1</sup> dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cilawu tahun 2023.

### **1.1 Landasan Hukum**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

- Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);



## **1.8. Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilawu tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cilawu guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilawu tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cilawu;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilawu Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renjaprovinci/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah Tahun Lalu;

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Cilawu sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indicator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan

kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan

kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai Kawasan dan apa saja yang terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

#### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tandatangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cilawu. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cilawu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cilawu selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cilawu Tahun 2021 antara lain :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan kedalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
 Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :
  - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - 2) Pengadaan Meubeulair
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
  - 5) Penataan Halaman Gedung/Kantor
3. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan.  
 Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :
  - 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa
  - 2) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
  - 3) Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Kecamatan
  - 4) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
  - 5) Sosialisasi BPNT Tingkat Kecamatan
  - 6) Penyusunan RPTK Kecamatan
  - 7) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
  - 8) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
  - 9) Pembinaan RT/ RW dan Lembaga Kemasyarakatan
  - 10) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui karang taruna
  - 11) Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Kecamatan

### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 25 Kegiatan terdapat 11 ( sebelas )Kegiatan ( %) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (91,16%)
2. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD (99,71)
3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (92,60%)
4. Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya (98,60%)
5. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (74,04%)
6. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (80,56%)
7. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak (80,13%)
8. Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (96,97%)
9. Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan (98,09%)
10. Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di wilayah Kecamatan (99,40%)
11. Pelaksanaan Tugas Forum Kordinasi pimpinan di Kecamatan (83,58%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target**  
**Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,942,597,828	1,770,942,696	91,16
2	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	17,400,000	17,350,000	99,71
3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,856,000	35,564,000	92,60
4	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1,920,314,000	1,893,483,000	98,60
5	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	9,440,320	6,990,365	74,04
6	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan	38,986,000	31,410,100	80,56
7	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,100,000	12,100,000	80,13
8	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	244,043,000	236,671,000	96,97
9	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	174,880,000	171,550,000	98,09
10	Sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di wilayah Kecamatan	40,374,700	40,134,700	99,40
11	Pelaksanaan Tugas Forum Kordinasi pimpinan di Kecamatan	200,000,000	167,170,000	83,58
	Jumlah			

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 25 Kegiatan terdapat 14 (Empat belas) Kegiatan (66,67%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan
2. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
3. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
5. Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan peralatan Rumah Tangga
7. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
8. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor.
10. Pengadaan Mebel
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
14. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target**  
**Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	5,503,000	5,503,000	100,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2,839,200	2,839,200	100,00
3	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,764,000	4,764,000	100,00
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	15,000,000	15,000,000	100,00
5	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	14,284,500	14,284,500	100,00
6	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	4,586,400	4,586,400	100,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	12,657,000	12,657,000	100,00
8	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,308,000	7,308,000	100,00
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor.	6,370,000	6,370,000	100,00
10	Pengadaan Mebel	0	0	0
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,172,200	20,172,200	100,00
12	Peningkatan partisipasi masyarakat dan Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14,333,000	14,333,000	100,00
13	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15,000,100	15,000,100	100,00
14	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	0	0	

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggraan yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari targetcapaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cilawu pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu berdampak pada laporan kinerja realisas ikeuangan Kecamatan Cilawu.

- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan

2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Cilawu merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cilawu selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Adapun capaian Renstra Kecamatan Cilawu tahun lalu (tahun 2020) seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3  
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Kete
a	B	c	D	e	f	G	H	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,05	Triwulan 1				
						Triwulan 2	84,28	84,19	100.13	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	84,28	84,28	84.23	
						Kondisi Akhir (F)		84.23	84.23	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2.1	Predikat SAKIP Kecamatan	Predikat	B	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	B	B	80.00	
						Kondisi Akhir (F)		80	80.00	

Sumber data : dari Dokumen sumber kepuasan Masyarakat

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja Kecamatan Cilawu tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja predikat sakiw kecamatan.
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan Indikator SasaranNilai Survey Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 84,19%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu Sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;  
Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Cilawu. Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Cilawu

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,37%	60,37%
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,37%	60,37%
7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60,37%	60,37%
7	1	1	2	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



7	1	1	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	95,58%	100%	95,58%	95,58%	100%	42,27%	42,27%
7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	91,16%	100%	91,16%	91,16%	100%	42,23%	42,23%
7	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7	1	1	2		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7	1	1	2	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Memadai	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
7	1	1	2	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang dilatih berdasarkan tugas dan fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7	1	1	2		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	95,58%	100%	95,58%	95,58%	100%	52,76%	52,76%
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penerangan Gedung Kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jumlah ATK sesuai dengan kebutuhan	100%	0%	100%	0%	0%	100%	53,40%	53,40%
7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65.97%	65.97%
7	1	1	2	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7	1	1	2	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

7	1	1	2	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait serta Desa	100%	99,16%	100%	99,16%	99,16%	100%	50%	50%
7	1	1	2		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>95,60%</b>	<b>100%</b>	<b>95,60%</b>	<b>95,60%</b>	<b>100%</b>	0%	0%
7	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang memadai	100%	92,6	100%	92,6	92,6	100%	0%	0%
7	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang memadai	100%	0%	100%	0%	0%	100%	99,86%	99,86%
7	1	1	2	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair yang memadai	100%	0%	100%	0%	0%	100%	99,91%	99,91%
7	1	1	2	4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kantor	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
7	1	1	2	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pennataan Halaman Gedung Kantor	100%	98,60%	100%	98,60%	98,60%	100%	0%	0%
7	1	1	2	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penataan Alun-Alun Kecamatan	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
7	1	1	2		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor</b>	<b>100%</b>	<b>91,34%</b>	<b>100%</b>	<b>91,34%</b>	<b>91,34%</b>	<b>100%</b>	<b>65,56%</b>	<b>65,56%</b>
7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Internet	100%	74,04%	100%	74,04%	74,04%	100%	48,83%	48,83%
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	56,85%	56,85%
7	1	1	2		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentasen pemenuhan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>80,34%</b>	<b>100%</b>	<b>80,34%</b>	<b>80,34%</b>	<b>100%</b>	<b>32,59%</b>	<b>32,59%</b>

7	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK , Jumlah Servis Kendaraan Dinas Operasional yang memadai	100%	80,56%	100%	80,56%	80,56%	100%	18,30%	18,30%
7	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran STNK , Jumlah Servis Kendaraan Dinas Operasional yang memadai	100%	80,13%	100%	80,13%	80,13%	100%	46,89%	46,89%
7	1	2		7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	96,97%	100%	96,97%	96,97%	100%	0%	0%
7	1	2	2	7	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	100%	96,97%	100%	96,97%	96,97%	100%	58,82%	58,82%
7	1	2	2	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	96,97%	100%	96,97%	96,97%	100%	58,82%	58,82%
7	1	2	2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Persentase Penyelenggaraan PATEN	100%	98,09%	100%	98,09%	98,09%	100%	50%	50%
7	1	2	2	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	98,09%	100%	98,09%	98,09%	100%	50%	50%
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7	1	3	2		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah Koordinasi dalam rangka Pemberdayaan .Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan RPTK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	3	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	fasilitasi Penanggulangan Covid-19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7	1	3	2		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tk Kecamatan yang diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
7	1	3	2	1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>100%</b>	<b>99,40%</b>	<b>100%</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,40%</b>	<b>100%</b>	0%	0%
7	1	4	2		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>99,40%</b>	<b>100%</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,40%</b>	<b>100%</b>	<b>25,22%</b>	<b>25,22%</b>
7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentramandan KetertibanUmum	100%	99,40%	100%	99,40%	99,40%	100%	49,97%	49,97%
7	1	4	2	2	Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	99,40%	100%	99,40%	99,40%	100%	0%	0%
7	1	4	2	3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7	1	4	2	4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	83,58%	100%	83,58%	83,58%	100%	50,92%	50,92%
7	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

7	1	5	2		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7	1	5	2	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%

Sumber Data dari Realisasi Restra

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing– masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cilawu sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat ditingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,5	8.2	82,5	83	82,75	84.19	84,19	84.20	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	70	75	80	80	80	80	82	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			81	82	84	85	81	81	82	82	
4	Predikat SAKIPKecamatan			cc	B	B	B	B	B	B	B	

Sumber dat

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBu;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cilawu ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*



*Responsibility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Cilawu serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Cilawu (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi

daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cilawu berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Cilawu sebesar Rp.4,666,068,725-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cilawu diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhandalam RKPD 2023 Kecamatan Cilawu mengusulkan 6 (enam) Program dengan 15 ( limabelas) kegiatan dan 44 (Empat puluh empat) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Cilawu mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cilawu

NO					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif ( Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana ( Rp.000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7					UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01				KECAMATAN				4,666,068,725	KECAMATAN				4,666,068,725	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,428,305,577	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOT	Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3,428,305,577	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14,156,600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14,156,600	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	2.161.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	2.161.800	
7	1	1	02.	2	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-	1 Dokume	1,999,200	Koordinasi dan Penyusunan	Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-	1 Doku	1,999,200	

			01		Dokumen RKA-SKPD	Cilawu	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n		Dokumen RKA-SKPD	Cilawu	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	men		
7	1	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	
7	1	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,999,800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,999,800	
7	1	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	2,000,000	

					Realisasi Kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,998,800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,998,800	
7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>2,354,194,692</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>2,354,194,692</b>	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cilawu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,350,108,692	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cilawu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,350,108,692	
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4,086,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4,086,000	
7	01	01	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>48,256,800</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>48,256,800</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	31,756,800	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	31,756,800	

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cilawu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	16,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Cilawu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	16,500,000	
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>169,092,100</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>298.518.556</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	11 Paket	13,587,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	11 Paket	13,587,000	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	32 Paket	33,384,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	32 Paket	33,384,200	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 Paket	22,083,600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	16 Paket	22,083,600	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	25,495,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	25,495,400	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	72 Dokumen	43,251,900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	72 Dokumen	43,251,900	

					Perundang-undangan	Cilawu	Perundang-Undangan yang Disediakan			Perundang-undangan	Cilawu	Perundang-Undangan yang Disediakan			
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1364 orang	31,290,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1364 orang	31,290,000	
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>726,133,500</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>726,133,500</b>	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	89,480,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	89,480,000	
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60,487,600	Pengadaan Mebel	Kecamatan Cilawu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60,487,600	
7	01	01	2,07	03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	26,166,200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	26,166,200	
7	011	01	02.07	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	549,999,700	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cilawu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	549,999,700	

7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>56.415.535</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>58.405.886</b>	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	23,711,385	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	23,711,385	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	32,704,150	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	32,704,150	
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>60,053,350</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>60,053,350</b>	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	31,459,650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	31,459,650	



7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	28,593,700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	28,593,700	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	512,692,390	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Cilawu	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	512,692,390	
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	283,130,300	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	283,130,300	

7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Dokumen	105,590,400	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Dokumen	105,590,400	
7	01	02	2,02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 Dokumen	177,539,900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18 Dokumen	177,539,900	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	1 Laporan	229,562,090	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	1 Laporan	229,562,090	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 laporan	42,562,600	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 laporan	42,562,600	

7	01	02	2,02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	186,999,490	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	186,999,490	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>86,301,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Cilawu	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>86,301,000</b>	
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>24,967,300</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>24,967,300</b>	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cilawu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan	9,996,800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cilawu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Laporan	9,996,800	
7	01	03	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14,970,500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14,970,500	

7	01	03	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	26,499,800	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Laporan	26,499,800	
7	01	03	2,01	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	10,000,000	
7	01	03	2,01	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Laporan	16,499,800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Laporan	16,499,800	
7	01	03	2,01		Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )	1 Laporan	34,833,900	Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )	1 Laporan	34,833,900	
7	01	03	2,01	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 laporan	14,898,900	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 laporan	14,898,900	
7	01	03	2,01	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 laporan	9,991,800	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 laporan	9,991,800	

7	01	03	2,013	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 laporan	9,943,200	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 laporan	9,943,200	
7	01	04		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>188,577,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Cilawu	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>188,577,000</b>	
7	01	04	2,01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>188,577,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Cilawu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>188,577,000</b>	
7	01	04	2,0101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	1 Kegiatan	121,661,200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	1 Kegiatan	121,661,200	
7	01	04	2,0102	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cilawu	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	66,915,800	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cilawu	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	66,915,800	

7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM</b>		Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>329,999,558</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	<b>329,999,558</b>	
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	<b>329,999,558</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecama tan Cilawu	Jumlah Laporan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	<b>329,999,558</b>	
7	01	05	2,01	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamat anCilawu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Laporan	142,999,558	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamat anCilawu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Laporan	142,999,558	

7	01	05	2,01	02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Laporan	187,000,000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Laporan	187,000,000	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>120,193,200</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Cilawu	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>120,193,200</b>	
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>120,193,200</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Cilawu	Junlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>120,193,200</b>	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Laporan	8,456,900	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Laporan	8,456,900	

7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	50,173,600	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	50,173,600	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Laporan	39,471,500	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cilawu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Laporan	39,471,500	
7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cilawu	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 laporan	39,471,500	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Cilawu	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 laporan	39,471,500	
<b>TOTAL</b>									<b>4,666,068,725</b>					<b>4,666,068,725</b>	



**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Cilawu melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Cilawu mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**

**Kecamatan : Cilawu**  
**Kabupaten : Garut**

No	Prioritas Daerah	Lokasi ( Desa/Kel )	Indikator Kinerja	Volume	Pagu	Catatan/ Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN</b>					
1	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Desa Mekarsari,sukamurni,sukatani,suka maju,sukahati,mangkurakyat,mekarsari	Pembentukan /pemekaran desa	7 Paket	1.400.000.000	DPMD
2	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Pasanggrahan,Dawungsari,Sukamurni,Mangkurakyat	Pembangunan Gedung Posyandu	4 Unit	200.000.000	Dinas PUPR

3	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Desa Mekarsari 4 Unit.Ngamplang 2 Unit,Mangkurakyat,Sukamurni,Desa kolot	Pembangunan RKB-SD	5 Desa	10.000.000.000	Disdik
4	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Desa Sukamaju	Bantuan mesin teknologi tempat guna khusus pertanian	1 Paket	500.000.000	Parkim
5	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Desa Dawungsari,Ngamplangsari,Margalak sana,Sukahati	Pipanisasi	4 Desa	600.000.000	PUPR
6	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Desa Mangkurakyat	Pembangunan sumur box	1 Desa	150.000.000	PUPR

7	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Desa Sukamurni	Pembangunan MCK umum	5 Unit	270.000.000	Dinkes
8	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Desa Sukamaju	Peningkatan kapasitas produksi kapasitas pertanian/peternakan desa	1 Keg	500.000.000	Distan
9	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Mekarmukti	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	1 Paket	200.000.000	Disperkim,PUPR
10	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Sukamurni,Mekarmukti	Pembangunan MCK	3 Paket	200.000.000	PUPR/Perkim

11	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Karyamekar 50 Unit,Desa Kolot 60 Unit,Pasanggrahan 50 Unit,Cilawu 10 Unit,Sukamaju 50 Unit,Dawungsari 25 Unit,Sukamurni 235 Unit,Sukatani 50 Unit,Sukahati	Pembangunan Rutilahu	9 Desa	1.200.000.000	Perkim
12	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Dawungsari,Pasanggrahan,Dayeuhmanggung,Desa Cilawu,Mekar Mukti,Mangkurakyat,Sukahati	Permohonan Bumdes	7 Desa	900.000.000	Diskop UMKM dan PUPR
13	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Mangkurakyat,Ngamplang,Karyamekar,Sukahati,Margalaksana,Pasanggrahan,Dangiang,Sukamaju,Desa Kolot,	Insentif Guru Ngaji	10 Desa	90.000.000	DPMD
14	Peningkatan instruktur Dasar Kinerja Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam pelayanan publik guna mewujudkan pemerintahan yang Bermartabat	Dawungsari,Pasanggrahan,Sukahati	Penerangan jalan umum (PJU)	3 Desa	300.000.000	Dishub
II	BIDANG INFRASTRUKTUR PERKEMBANGAN WILAYAH (IPW)6					

1	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	Mekarmukti 50 Unit, Dayeuhmanggung 100 Unit, Mekarsari 100 Unit, Karyamekar 50 Unit, Sukahati 50 Unit, Sukamurni 235 Unit, Dawungsari 25 Unit Sukamaju 50 Unit, Cilawu 100 Unit, Pasanggrahan 50 Unit dan Desa Kolot 60 Unit.)	Bantuan perbaikan rumah Tidak Layak Huni untuk cegah kumuh	14 Desa	9.900.000.000	Perkim
2	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Kp Ciawi Tali 245m, Cigadog 200m, Serang 100m, Cirek 100m, Cigandok 100m, Desa Karyamekar), ( Cisumur 3000m Tanjungsari 500m, Rp 200.000.000, Desa Mekarsai), Kp Nyalindung 1800m Desa Ngamplang), ( Kp Cinangka RW 8,12,14 Desa mangkurakyat,) Kp Desakolot 100m, TPT Makam Ciraab 200m, TPT Cipari 700m, Sukasari 200m, Cihalimun 100m, Cisaat 100m, Desa Sukatani), ( TPT Blok Samboja 1800m, Desa Margalaksana)( TPT Ciharur RW 6, 8 265m, Cukwiwi 100m, Kiara Janggot 125m, Desa Dangieng), ( Desa sukamukti 1,2,3 1000m,TPT Cibogobodas 300m, Mularajen RW 123 1.050m, Pasirjeruk 350m, Jolok 300m, Caringin RW 11,12 600m, TPT TPU 2,3,46,12,13 Desa Mekarmukti), ( TPT MakamNegla 500m, TPT Cikole-Cirek 400m Desa Sukamaju), ( TPT RW 01,07 Pasanggrahan), ( TPT RW 07 Desa dawungsari ).	Pembangunan tembok penahan tanah untuk cegah kumuh (TPT)	14 Desa	1.800.000.000	Disperkin

3	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	( Sukamukti), ( Sukamurni 500m Rp 350.000.000), ( Dawungsari 1000m Rp 2.000.000.000), ( Dayeuhmanggung 450m Rp.350.000.000)	Pembangunan TPT Jalan Desa	4 Desa	900.000.000	PU/PR
4	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	RW 07, RW 6, RW 2, RW01, RW 03, Desa Sukahati	Pembangunan TPT Anak Sungai Cimanuk	1800m	2.000.000.000	PUPR
5	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	( Sukahati RW 2,2 Rp 80.000.000), ( Cilawu 5 KM Rp 250.000.000). ( Sukamukti dusun 1,2,3 Rp 100.000.000), ( Skamaju RW 3,4,5,6 9,11 50Unit Rp 100.000.000),( Pasanggrahan RW 5,6 Rp 200.000.000), Dawungsari RW 6 Rp 100.000.000),( Sukamurni RW 6 350 m Rp 250.000.000).	Sarana Air Bersih dan Pervipaan	7 Desa	1.775.000.000	PUPR
6	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	Ds Dangieng 64m2, Rp.150.000.000, Kp Cigadog Ds Karyamekar RW 07 1 Unit Rp.50.000.000	PAUD		200.000.000	PUPR
7	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	Sukamurni	Pembangunan Sarana Prasarana Peternakan Sapi ( Pelimbahan Kotoran Limbah Sapi )	1 Desa	450,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

8	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(jalan Desa Kp. Cigadig 650 M Ds Karyamekar), (Dusun III Ds Sukatani),(Selokan Dusun 1,2,3, Ds Sukamukti), (Drainase pemukiman 500 M Ds Dayeuhmanggung), (Kp. Cikupa dan Kp. Padarek 1200 M Ds. Sukahati	Drainase jalan Desa	1,200 M	750,000,000	PUPR
9	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Ds Mekarmukti Kp. Cibogo Bodas 350 M Rp. 195,000,000, Wangunjaya 350 M Rp. 195,000,000, Caringin 350 M Rp. 195,000,000, Cipulus 350 M Rp. 195,000,000), (Ds Dawungsari Rw 01, 02, 03, 06, 650 M Rp. 650,000,000), Ds. Dangiangan Kp. Kiarajanggot 150 M Rp. 195,000,000, Ciharus 120 M Rp. 175,000,000 ), (Ds. Margalaksana Kp. Cigaladag 950 M Rp. 350,000,000), (Ds Ngamplangsari Kp. Kandang Uncal 100 M Rp. 150,000,000)	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan	4 Desa	2,315,000,000	Disperkin
10	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Kp. Cikupa 600 M, Kp. Padarek 600 M Ds. Sukahati), (Kp. Kandang uncal 100 M Ds. Ngamplang), (Kp. Cigadog 950 M Ds. Ngamplangsari), (Kp. Cihalinun 500 M Ds. Sukatani), (Kp. Ciharus 145 M, Kiarajanggot 150 M Ds Dangiangan), (Lingkungan Dusun 1,2,3, Ds. Sukamukti), Sujasari, Bbk Sukasari, Pasir Jeruk, Jolok, Wangunjaya, Caringin, Cipulus 250 M	Pembangunan TPT Lingkungan	9 Desa	1,400,000,000	Disperkin



		Ds. Mekarmukti), (Rw 01,05, 400 M Ds. Sukamaju), (Rw 1,2,3,6,7 650 M Ds. Dawungsari)				
11	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Ds. Pasanggrahan Rw 02, 2520 M Rp. 100,000,000), (Ds. Dayeuhmanggung-Karyamekar 250 M Rp. 250,000,000)	Pembangunan Jalan Poros Desa	2 Desa	350,000,000	PUPR
12	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Ds. Sukahati 1,2,3, 50 Unit Rp. 350,000,000), (Karyamekar 40 Unit Rp. 360,000,000), (Ngamplang 48 Unit Rp. 200,000,000), (Ngamplangsari 95 Unit Rp. 142,000,000), (Mangkurayat 50 Unit Rp. 300,000,000), (Dawungsari 10 Unit Rp. 100,000,000), (Margalaksana 95 Unit Rp. 142,000,000), (Ds. Dayeuhmanggung 25 Unit Rp. 60,000,000), (Ds. Desakolot 10 Unit Rp. 50,000,000), (Ds. Mekarmukti 28 Unit Rp. 225,000,000), (Ds. Sukatani 36 Unit Rp. 360,000,000)	Penerangan jalan umum (PJU)		2,289,000,000	Dishub

13	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Rw 01,013, 13,000 M Rp. 2,335,000,000 Ds. Mekarmukti), (Kp. Pasirlimus 300 M Rp. 150,000,000, Jl. Lingkungan Mesjid Alwasila 300 M Rp. 150,000,000, Rw 01-06 1,400 M Rp. 348,000,000, Kp. Cikandawe 100 M Rp. 750,000,000 Ds. Dawungsari), Ds. Dayeuhmanggung 1,500 M Rp. 350,000,000), (Ds. Pasanggrahan 1,400 M Rp. 198,000,000), (Ds. Sukamaju Rw. 03,04,10, 1,050 Rp. 950,000,000), (Ds. Sukamukti Dusun 1,2,3, 1000 M Rp. 800,000,000), (Ds. Margalaksana Kp. Lamping Rw. 05 700 M Rp. 300,000,000, Kp. Genteng 600 M Rp. 250,000,000), (Ds. Sukatani dusun 1,2,3, 2,400 M Rp. 400,000,000), (Ds. Mekarsari Cibojong 1,000, Rp. 200,000,000, Cigarungsang 1,000, Rp. 200,000,000, Bojongherang 10,000 M Rp. 200,000,000, Neglasari 10,000 M Rp. 200,000,000, Rw. 01-02 12,000 M Rp. 2,400,000,000)	Pembangunan Jalan Lingkungan	9 Desa	5,699,000,000	PUPR
----	--	--	------------------------------	--------	---------------	------

14	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Ds. Sukamurni Rw. 07,08,13, 400 M Rp. 350,000,000,), (Ds. Sukamaju Jl. Cikole 1,500 M Rp. 10,000,000,000, Jl. Desa Rw. 07,08, 2,000 M Rp. 180,000,000,000,), (Ds. Mekarmukti Rabat Beton Jl. Dusun 3, 300 M, zRp. 350,000,000), (Ds. Ngamplangsari Dusun 1,2,3, 700 M R.p. 300,000,000, Kp. Cimaragas 600 M Rp. 250,000,000,), (Ds. Sukahati Pembangunan infeksi Jalan Irigasi 1,200 M Rp. 200,000,000,000)	Pembangunan Jalan Desa	5 Desa		PUPR
15	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Ds. Mekarmukti Kp. Bbk sukasari 1 Unit Rp. 150,000,000, Mualarejen Rw. 02,03 1 unit Rp. 300,000,000, Pasir jeruk 1 Unit Rp. 150,000,000, Caringin 1 Unit Rp. 150,000,000, Cipulus tonggoh 1 Unit Rp. 150,000,000), (Ds. Desakolot Dusun 2 Kp. Ladeurat Rt. 02 Rw.05, 40 M Rp. 400,000,000)	Tempat Pemakaman Umum (TPU)		940,000,000	Disperkin
16	Peningkatan instruktur Dasar, dan Pelayanan Masyarakat	(Ds. Ngamplangsari I Unit Rp. 100,000,000), (Ds. Mekarsari Kp. Cikayang 50 M Rp. 500,000,000), (Ds. Dayeuhmanggung 8 Paket Rp. 80,000,000), (Ds. Dawungsari 1 Paket Rp. 300,000,000), (Ds. Margalaksana 1 Unit Rp. 100,000,000), (Ds. Karyamekar Kp. Cirerek Rw. 11, 50 M Rp. 50,000,000)	Pembangunan / Pengadaan Bak Sampah		2,300,000,000	DLH

17	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Masyarakat	Desa Pasanggrahan RW. 02,05 dan 06 330 m2 Rp. 450000000),(Desa Ngamplang 1 Unit Rp.150000000),( Desa Mekarmukti Kp. Mularajen 14 m² Rp. 180000000),( Desa Dawungsari Rt 02,05, 300 m² Rp. 450000000)	Pembangunan Madrasah		1,130,000,000	PUPR
18	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Masyarakat	Dayeuhmanggung Pembangunan Irigasi 70 m Rp 100000000),( Desa Cilawu Dusun 1,2,3 )Pembangunan Irigasi desa Dangieng Kp. Ciharus 180 m Rp. 195000000,Sindangdaweung 160 m Rp.195000000,Salem 135 m Rp. 145000000,Jinispati 160 m Rp. 195000000,Ciomas 180 m Rp 195000000),( Desa Mekarmukti Kp. Cisaat 1 Unit Rp. 250000000, Kp. Babakan Sukasari 1 Unit Rp. 250000000),( Desa Dawungsari Kp. Cibitung 2, Cibitung 4,300 m Rp. 250000000,DAS Cipeujeuh 300 m Rp. 150000000)	Pembangunan Saluran Irigasi/Pembangunan Sub.DAS	5 Desa	2675000000	PUPR
19	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Masyarakat	Kp. Cimaung Kulon Desa Desakolot	Pembangunan Pintu Air/Bendungan SUB DAS Gandok Cipeujeuh	80 m	300000000	PUPR

III	BIDANG EKONOMI DAN SDA					
1	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	(Desa Cilawu 1 Paket Rp. 2000000000), (Dawungsari Kp. Bojongasih 1 Paket Rp 9000000000),(Desa Sukamaju Desawisata Sindangakasih 1 Keg Rp. 1000000000,Desa wisata Camping Ground 1 Keg Rp. 1000000000,Pembangunan Wisata Religi Eyang Wali dunia 1 Paket Rp. 5000000000,Desa Wisata Cilumayan 1 keg Rp. 1000000000),( Desa Pasanggrahan Desa Wisata 1 Paket Rp. 1000000000),( Desa Sukatani Wahana Sarana Wisata 5 Paket Rp. 1000000000)	Pembangunan dan Pengembangan Pemeliharaan Desa Wisata	5 Desa	67000000000	Disparbud
2	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	(Desa Sukamaju 3 Paket Rp 4000000000),(Desa Sukamurni 7 Kelompok Rp 2300000000),(Desa Ngamplangsari 1 Paket Rp. 2500000000),(Desa Sukatani Modal perikanan 12 RW Rp. 4000000000),(Desa Karyamekar Modal perikanan 12 RW Rp. 4000000000)	Bantuan Pengembangan Paerikanan	5 Desa	16800000000	Dispertan

3	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	(Desa Mekarmukti 1 Paket Rp. 250000000),(Desa Pasanggrahan 1 Paket Rp. 350000000),(Desa Cilawu 1 Paket Rp.100000000),(Desa Mangkurakyat 2 Paket),( Desa Mekarsari 1 Paket Rp. 500000000),( Desa Sukahati 1 Paket Rp. 100000000)	Pengadaan Alat Kewsenian	7 Desa	9500000000	Disparbud
4	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	( Desa Sukamukti 5 Poktan Rp.2500000000,9Desa Sukamukti Rp. 100000000),(Desa Margalaksana 100 Ekor Rp. 125000000)	Bantuan Usaha Ayam Petelur	3 Desa	475000000	Disnakanla
5	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	(Desa Mekarmukti 10 PoktanRp.500000000),(Desa Sukatani 20 Ekor Rp.20000000),(Desa Ngamplangsari ...),(Desa Karyamekar 220 Ekor Rp. 246500000)	Pengembangan Kelompok Peternakan Kambing/Domba	4 Desa	7665000000	Disnakanla
6	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Desa Ngamplang Dusun 1,2,3, 1 Paket),(Desa sukamukti Dusun 1,2,3 Rp. 100000000),(Desa Sukamaju 5 Paket Rp. 500000000),(Desa Dangiing 55 KK Rp. 250000000),(Desa Margalaksana 5 Kel. Rp. 200000000),(Desa Ngamplangsari 1 Paket Rp	Bantuan Modal/Pengembangan UMKM		1200000000	DISKOP

		100000000)				
7	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Desa Ngamplang 1 Pket	Pelatihan bagi Pelaku UMKM	1 Desa	100000000	Diskop
8	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	(Desa Pasanggrahan 1 Paket Rp.200000000),(Desa Sukamaju 9 Paket Rp. 500000000),( Desa Cilawu 1 Paket Rp.200000000)	Pengembangan Kelompok Pertanian		900000000	Distan
9	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Desa Mekarsari	Bantuan Sarana dan Prasarana Olah Raga		200000000	Dispora
10	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Desa Mekarmukti Rw 04 dan RW 09.Panjang 2000 M Rp. 400000000	Peambangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani		400000000	Distan

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahkan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumberdaya manusia, dengan membangun SDM pekerjakeras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahkan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;



2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cilawu. mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatny a kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	84
2	Meningkatny a Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluraha n	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna n	84%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber data dari Renstra

**3.3 Program dan Kegiatan Prioritas**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Cilawu merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Cilawu sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cilawu diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cilawu merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cilawu diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Cilawu. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### - Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 (**Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**) Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cilawu diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang

membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Cilawu sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cilawu melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Cilawu Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dan 14 (empatbelas) Kegiatan dan 44 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kecamatan Cilawu sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kecamatan Cilawu dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 64,666,068,725,-.

Adapun Program Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cilawu pada Tahun 2023 adalah :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.8.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.8.2. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.8.3. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.8.4. Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.8.5. Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.8.6. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  
ikhtiar Realisasi kinerja SKPD

1.8.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  
SKPD

**1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan  
Fungsi

**1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan  
Kantor

2.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-  
undangan

2.5.6 Fasilitas Kunjungan Tamu

## 2.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.6.2 Pengadaan Mebel

2.6.3 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya

2.6.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## 2.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.1.1 Koordinasi Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

### 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

2.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

## **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**



Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan pelayanan kepada  
masyarakat di wilayah Kecamatan

### 3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Penyelenggaraan Lemabaga Kemasyarakatan

3.1.2 Peningkatan Kapasitas Lemabaga Kemasyarakatan

### 3.3 Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM)

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

3.1.1 Pencegahan copid-19 di Tingkat Desa

3.1.2 Penanganan copid-19 di Tingkat Desa

3.1.3 Pembinaan Penanganan copid-19 di Tingkat Desa

## **4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,  
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah  
Kecamatan

4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh  
Masyarakat

## **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

### 5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  
dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,  
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta  
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

5.1.2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

6.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 beriku



**Tabel T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Garut**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu

Kode					Urusan/ BidangUrusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			RencanaTahun 2023						Catata nPenti ng	PrakiraanMajuRencanaTahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiata n	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana ( Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/  PaguIndikatif (Rp.)	
										Program	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiat an				TolokUkur	Target		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN								4,666,068,725				5,058,832,641		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,428,305,577				3,773,716,177		
7	1	1	2:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14,159,600				15,578,024		
7	1	1	2:01	1	PenyusunanDok umenPerencana anPerangkat Daerah	Persentasepe layanadanmi nistrasiperka ntoran	JumlahDokumenP erencanaanPerang kat Daerah	Jumlahpel ayanadan ministrasip erkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 per sen	2 Doku men	100 p ersen	2,161,800			Persentase pelayanan administra siperkanto ran	100 perse n	2,378,024	
7	1	1	2:01	2	Koordinasi dan PenyusunanDok umen RKA- SKPD	Persentasepe layanadanmi nistrasiperka ntoran	JumlahDokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyus unanDokumen RKA-SKPD	Jumlahpel ayanadan ministrasip erkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 per sen	1 Doku men	100 p ersen	1,999,200	Dana Transfer Umum- Dana AlokasiU mum		Persentase pelayanan administra siperkanto ran	100 perse n	2,200,000	
7	1	1	2:01	3	Koordinasi dan PenyusunanDok umenPerubahan RKA-SKPD	Persentasepe layanadanmi nistrasiperka ntoran	JumlahDokumenP erubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyus unanDokumenPer ubahan RKA- SKPD	Jumlahpel ayanadan ministrasip erkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 per sen	1 Doku men	100 p ersen	2,000,000	Dana Transfer Umum- Dana AlokasiU mum		Persentase pelayanan administra siperkanto ran	100 perse n	2,200,000	

7	1	1	2:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi Kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi Kantor	100 persen	2,200,000
7	1	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi Kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi Kantor	100 persen	2,200,000
7	1	1	2:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administrasi Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelayanan administrasi Kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Laporan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi Kantor	100 persen	2,200,000
7	1	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi Kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,998,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi Kantor	100 persen	2,200,000
7	1	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,354,194,692	2,589,634,748				

7	1	1	2:02	1	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Presentasepe menuhanad ministrasike uanganperan gkatdaerah	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	Jumlahpe menuhana dministrasi keuanganp erangkatda erah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 pre sen	12 Bula n	100 p ersen	2,350,108,692	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministr asikeuang anperangk atdaerah	100 prese n	2,585,139,961
7	1	1	2:02	5	Koordinasi dan PenyusunanLap oranKeuangan Akhir Tahun SKPD	Presentasepe menuhanad ministrasike uanganperan gkatdaerah	JumlahLaporanKe uangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyus unanLaporanKeua ngan Akhir Tahun SKPD	Jumlahpe menuhana dministrasi keuanganp erangkatda erah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 pre sen	1 Lapor an	100 p ersen	4,086,000			Presentase pemenuha nadministr asikeuang anperangk atdaerah	100 prese n	4,494,787
7	1	1	2:05	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah									48,256,800				53,088,750	
7	1	1	2:05	2	PengadaanPakai an Dinas besertaAtributKe lengkapannya	Presentasepe menuhanad ministrasike pegawaianpe rangkatdaera h	JumlahPaketPakai an Dinas besertaAtributKele ngkapan	Jumlahpe menuhana dimintrasik epegawaian perangkatt daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 pre sentase	50 Pake t	100 p ersen	31,756,800	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministr asikepega waianpera ngkatdaer ah	100 prese ntase	34,938,750
7	1	1	2:05	9	Pendidikan dan PelatihanPegawa iBerdasarkanTu gas dan Fungsi	Presentasepe menuhanad ministrasike pegawaianpe rangkatdaera h	JumlahPegawaiBe rdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlahpe menuhana dimintrasik epegawaian perangkatt daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 pre sentase	9 Oran g	100 p ersen	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministr asikepega waianpera ngkatdaer ah	100 prese ntase	18,150,000
7	1	1	2:06	AdministrasiUmumPerangkat Daerah									169,092,100				186,366,350	
7	1	1	2:06	1	PenyediaanKom ponenInstalasi Listrik/Penerang anBangunan Kantor	Presentasepe menuhanad ministrasiu mperangkat daerah	JumlahPaketKom ponenInstalasi Listrik/Peneranga nBangunan Kantor yang Disediakan	Jumlahpe menuhana dministrasi keuanganp erangkatda erah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 per sen	11 Pake t	100 p ersen	13,587,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministr asiumump erangkatt daerah	100 perse n	14,946,560

7	1	1	2:06	2	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentasepenuhanadministrasiumperangkat daerah	JumlahPaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlahpe menuhana dministrasi keuanganperangkatdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	32 Paket	100 persen	33,384,200	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministrasiumperangkatdaerah	100 persen	36,726,113
7	1	1	2:06	3	PenyediaanPeralatanRumahTangga	Presentasepenuhanadministrasiumperangkat daerah	JumlahPaketPeralatanRumahTangga yang Disediakan	Jumlahpe menuhana dministrasi keuanganperangkatdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	16 Paket	100 persen	22,083,600	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministrasiumperangkatdaerah	100 persen	24,506,124
7	1	1	2:06	5	PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	Presentasepenuhanadministrasiumperangkat daerah	JumlahPaketBarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlahpe menuhana dministrasi keuanganperangkatdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	7 Paket	100 persen	25,495,400	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministrasiumperangkatdaerah	100 persen	28,145,246
7	1	1	2:06	6	PenyediaanBahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Presentasepenuhanadministrasiumperangkat daerah	JumlahDokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	Jumlahpe menuhana dministrasi keuanganperangkatdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	72 Dokumen	100 persen	43,251,900	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministrasiumperangkatdaerah	100 persen	47,577,393
7	1	1	2:06	8	FasilitasiKunjunganTamu	Presentasepenuhanadministrasiumperangkat daerah	JumlahLaporanFasilitasiKunjungan Tamu	Jumlahpe menuhana dministrasi keuanganperangkatdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1364 Orang	100 persen	31,290,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuha nadministrasiumperangkatdaerah	100 persen	34,464,914
7	1	1	2:07	<b>PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah</b>									<b>726,133,500</b>					<b>798,924,582</b>
7	1	1	2:07	1	PengadaanKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Presentasepenuhanpengadaanbarangmilikdaerah penunjangurusanpemerintahdaerah	Jumlah Unit KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlahpe menuhanpengadaanbarangmilikdaerah penunjangurusanpemerintahdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Unit	100 persen	89,480,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum		Presentase pemenuhanpengadaanbarangmilikdaerah penunjangurusanpemerintahdaerah	100 persen	98,494,000

7	1	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu	100 persen	1 Paket	100 persen	60,487,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	66,550,000
7	1	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu	100 persen	2 Unit	100 persen	26,166,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	28,880,582
7	1	1	2:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu	100 persen	1 Paket	100 persen	549,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	605,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2:08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>56,415,535</b>					<b>64,057,723</b>
7	1	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu	100 persen	12 Bulan	100 persen	23,711,385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	28,082,883



7	1	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	12 Bulan	100 persen	32,704,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	100 persen	35,974,840
7	1	1	2:09	PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah									60,053,350					66,066,000
7	1	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan pemeliharaan barangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahand daerah	JumlahKendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan barangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahand daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Unit	100 persen	31,459,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan pemeliharaan barangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintah and daerah	100 persen	34,606,000
7	1	1	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Presentase pemenuhan pemeliharaan barangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahand daerah	JumlahKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan barangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintah and daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	8 Unit	100 persen	28,593,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan pemeliharaan barangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintah and daerah	100 persen	31,460,000
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									512,692,390					563,972,895
7	1	2	2:01	KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan									283,130,300					311,454,000
7	1	2	2:01	1	Koordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatanPemerintah andenganPerangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait	Persentasejumlahlaporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatanpemerintahand tingkatkecamatan	JumlahLaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan dan PelaksanaanKegiatanPemerintahandenganPerangkat Daerah dan InstansiVertikalTerkait	Jumlahlaporanpelaksanaankoordinasi penyelenggaraan kegiatanpemerintahand tingkatkecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	18 Dokumen	1 laporan	105,590,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlahlaporanpelaksanaankoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan	1 laporan	116,160,000

7	1	2	2:01	2	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasejumlahlaporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan	JumlahDokumenPeningkatanEfektifitasKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlahlaporanpelaksanaankoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan	Kab. Garut, Cilawu,	1 laporan	18 Dokumen	1 laporan	177,539,900	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmun	Persentase jumlahlaporanpelaksanaankoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan	1 laporan	195,294,000
7	1	2	2:02		<b>PenyelenggaraanUrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								<b>229,562,090</b>				<b>252,518,895</b>
7	1	2	2:02	1	PerencanaanKegiatanPelayanankepada Masyarakat di Kecamatan	Persentasejumlahlaporan penyelenggaraanurusanpemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjaperangkatdaerah yang ada di kecamatan	JumlahDokumenPerencanaanKegiatanPelayanankepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlahlaporanpenyelenggaraanurusanpemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjaperangkatdaerah yang ada di kecamatan	Kab. Garut, Cilawu,	1 laporan	5 Dokumen	1 laporan	42,562,600	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmun	Persentase jumlahlaporanpenyelenggaraanurusanpemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjaperangkatdaerah yang ada di kecamatan	1 laporan	46,818,895

7	1	2	2:02	3	PeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayananKepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentasejumlahlaporanpenyelenggaraanurusanpe merintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerjaperangkatdaerah yang ada di kecamatan	JumlahPeningkatanEfektifitasPelaksanaanPelayananKepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlahlaporanpenyelenggaraanurusanpe merintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerjaperangkatdaerah yang ada di kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	10 Orang	1 laporan	186,999,490	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum	Persentase jumlahlaporanpenyelenggaraanurusanpe merintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerjaperangkatdaerah yang ada di kecamatan	1 laporan	205,700,000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>86,301,000</b>				<b>95,146,715</b>
7	1	3	2:01		<b>KoordinasiKegiatanPemberdayaanDesa</b>								<b>24,967,300</b>				<b>27,500,000</b>
7	1	3	2:01	1	PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapatdiberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasidalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Jumlahkoordinasikegiatanpemberdayaandesa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiatan	1 laporan	9,996,800	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapatdiberdayakan	100 %	11,000,000
7	1	3	2:01	3	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapatdiberdayakan	JumlahLaporanPeningkatanEfektivitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlahkoordinasikegiatanpemberdayaandesa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiatan	1 laporan	14,970,500	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiU mum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapatdiberdayakan	100 %	16,500,000
7	1	3	2:03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>26,499,800</b>				<b>29,150,000</b>

7	1	3	2:03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	1 laporan	11,000,000
7	1	3	2:03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu	1 laporan	2 Kegiatan	1 laporan	16,499,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	1 laporan	18,150,000
7	1	3	2:05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							34,833,900				38,496,715		
7	1	3	2:05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu	100 %	1 Dokumen	1 laporan	14,898,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,496,715
7	1	3	2:05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu	100 %	1 Dokumen	1 laporan	9,991,800			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	11,000,000

7	1	3	2:05	3	PembinaanPena nganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapatdiberda yakan	JumlahDokumenP embinaanPenanga nan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlahkoo rdinasi dan sinkronisas ipemberlak uanpembat asankegiat anmasyara kat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Doku men	1 lapo ran	9,943,200	Dana Transfer Umum- Dana AlokasiU mum		Persentase Masyaraka t Desa dan Kelurahan yang dapatdiber dayakan	100 %	11,000,000
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>188,577,000</b>					<b>207,435,139</b>
7	1	4	2:01		<b>KoordinasiUpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum</b>								<b>188,577,000</b>					<b>207,435,139</b>
7	1	4	2:01	1	Sinergitasdenga nKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	PersentasePe nangananGa ngguanTrant ibum	JumlahLaporan Hasil SinergitasdenganK epolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	JumlahPen angananGa ngguanTra ntibum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiat an	1 Kegi atan	121,661,200	Dana Transfer Umum- Dana AlokasiU mum		Persentase Penangan anGangu anTrantib um	100 %	133,827,512
7	1	4	2:01	2	HarmonisasiHub ungandenganTo koh Agama dan Tokoh Masyarakat	PersentasePe nangananGa ngguanTrant ibum	JumlahLaporanPel aksanaanHarmoni sasiHubunganden ganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	JumlahPen angananGa ngguanTra ntibum	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiat an	1 Kegi atan	66,915,800	Dana Transfer Umum- Dana AlokasiU mum		Persentase Penangan anGangu anTrantib um	100 %	73,607,627
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>								<b>329,999,558</b>					<b>363,000,000</b>
7	1	5	2:01		<b>PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmumSesuaiPenugasanKepala Daerah</b>								<b>329,999,558</b>					<b>363,000,000</b>

7	1	5	2:01	1	PembinaanWawa sanKebangsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangkaMe mantapkanPeng amalan Pancasila, PelaksanaanUnd ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhin neka Tunggal IkasertaPemerta hanan dan PemeliharaanKe utuhan Negara KesatuanRepubl ik Indonesia	Persentaseju mlahlaporan penyelenggar aanurusanpe merintahanu mumsesuaip enugasankep aladaerah	Jumlah Orang yang MengikutiPembina anWawasanKeban gsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangkaMem antapkanPengama lan Pancasila, PelaksanaanUnda ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinne ka Tunggal IkasertaPemertaha nan dan PemeliharaanKeut uhan Negara KesatuanRepublik Indonesia	Jumlahlap oranpenyel enggaraan urusanpem erintahdaer ahsesuaip nugasanke paladaerah	Kab. Garut, Cilawu	1 lapor an	1 Lapor an	1 lapo ran	142,999,558	Dana Transfer Umum- Dana AlokasiU mum	Persentase jumlahlap oranpenye lenggaraa nurusanpe merintaha numumse suaipenug asankepal adaerah	1 laporan	157,300,000
7	1	5	2:01	8	PelaksanaanTug as Forum KoordinasiPimpi nan di Kecamatan	Persentaseju mlahlaporan penyelenggar aanurusanpe merintahanu mumsesuaip enugasankep aladaerah	JumlahDokumenT ugas Forum KoordinasiPimpin an di Kecamatan	Jumlahlap oranpenyel enggaraan urusanpem erintahdaer ahsesuaip nugasanke paladaerah	Kab. Garut, Cilawu	1 lapor an	1 Doku men	1 lapo ran	187,000,000	Dana Transfer Umum- Dana AlokasiU mum	Persentase jumlahlap oranpenye lenggaraa nurusanpe merintaha numumse suaipenug asankepal adaerah	1 laporan	205,700,000
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							120,193,200					55,561,715
7	1	6	2:01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahanDesa</b>							120,193,200					55,561,715

7	1	6	2:01	1	FasilitasiPenyusunanPeraturanDesa dan PeraturanKepala Desa	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	JumlahDokumen yang DifasilitasidalamrangkaPenyusunanPeraturanDesa dan PeraturanKepalaDesa	Jumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kab. Garut, Cilawu,	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	22,091,200	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1 laporan	24,490,000
7	1	6	2:01	2	FasilitasiAdministrasi Tata PemerintahanDesa	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	JumlahDokumen yang DifasilitasidalamrangkaAdministrasi Tata PemerintahanDesa	Jumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kab. Garut, Cilawu,	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	8,456,900	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1 laporan	8,470,000
7	1	6	2:01	12	FasilitasiPelaksanaanTugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPelaksanaanTugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kab. Garut, Cilawu,	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	50,173,600	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1 laporan	12,921,715

7	1	6	2:01	13	FasilitasiPenyusunanPerencanaan Pembangunan Partisipatif	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	JumlahDokumenFasilitasidalamrangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kab. Garut, Cilawu,	1 laporan	2 Kegiatan	1 laporan	39,471,500	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmunum	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1 laporan	9,680,000
TOTAL													4,666,068,725				5,058,832,641



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Cilawu Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 15 (limabelas) Kegiatan dan 44 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut sebesar Rp 4,666,068,725,-(Empat Milyar Enamratus Enampuluh Enamjuta Enampuluh Delapanribu Tujuhratus Duapuluh Lima rupiah ), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang  
Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan  
Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3,428,305,577,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan  
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan  
Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian  
Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat  
Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik  
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja  
Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

1.1 KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahDengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 14,159,600,-

- Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan
2. Jumlah dokumen kordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
3. Jumlah dokumen kordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.
4. Jumlah dokumen kordinasi dan penyusunan DPA-SKPD.
5. Jumlah dokumen kordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD.
6. Jumlah dokumen kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat DaerahDengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.354,194,692,-

- Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 48,256,800,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 169,092,100,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan  
4. Jumlah Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan  
5. Jumlah Penyediaan bahan bacaan (Majalah/Koran/Media Massa) dan peraturan perundang-undangan  
6. Jumlah Penyediaan Fasilitas kunjungan tamu Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja

Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 726,133,500,-

Keluaran : 1. Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan.  
2. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan.  
3. Jumlah pengadaan peralatan dan mesinlainnya.  
4. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 56,415,535,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 60,053,350,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lapanagan Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 512,692,390,-

Keluaran : 1. Jumlah LaporanKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 283,130,300,-  
Keluaran : 1. Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan  
2. dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  
3. Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 229,562,090,-  
Keluaran : 1. Jumlah penyusunan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 86,301,000,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

4. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 24,967,300,-

Keluaran : 1. Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 26,499,800,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  
 3. Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  
 Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%  
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

3.3 Kegiatan Kordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM)

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan  
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 34,833,900,-  
 Keluaran : 1 Jumlah laporan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  
 3. Jumlah lpaoran Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  
 4. Jumlah Laporan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Keluraha  
 Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%  
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%  
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 188,577,000,-  
 Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum



Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

4.1 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp.188,577,000 ,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 329,999,558,-

Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan

Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 329,999,558,-
- Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Jumlah Pelaksanaan tugas forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 120,000,000,-
- Keluaran : - Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Partisipatif

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 22,091,200,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

6.2 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 8,456,900,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cilawu

6.3 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

	Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 50,173,600,-
Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Cilawu

#### 6.4 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian Program	: Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 57.999.090,-
Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Hasil	: Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Cilawu

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp 4,666,068,725,- ( Empat Milyar Enamratus Enampuluh Enamjuta Enampuluh Delapanribu Tujuhratus Duapuluh Lima rupiah ).

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Cilawu . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Garut  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Cilawu

Kode					Urusan/ BidangUrus an/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			RencanaTahun 2023						Catatan Penting	PrakiraanMajuRencanaTahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagulndikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/  Pagulndikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				TolokUkur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN								4,666,068,725			5,059,665,231		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,428,305,577			3,773,716,177		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								14,159,600			15,578,024		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan DokumenPerencanaanPerangkat Daerah	Persentasepelayanadan ministrasiperkantoran	JumlahDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	Jumlahpelayanadanadministrasiperkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Dokumen	100 persen	2,161,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasepelayanadan ministrasiperkantoran	100 persen	2,378,024
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentasepelayanadan ministrasiperkantoran	JumlahDokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlahpelayanadanadministrasiperkantoran	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,999,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasepelayanadan ministrasiperkantoran	100 persen	2,200,000

7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi per kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi per kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi per kantor	100 persen	2,200,000
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi per kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi per kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi per kantor	100 persen	2,200,000
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi per kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah pelayanan administrasi per kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi per kantor	100 persen	2,200,000

7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administrasi per kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelayanan administrasi per kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Laporan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi per kantor	100 persen	2,200,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi per kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi per kantor	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,998,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi per kantor	100 persen	2,200,000
7	1	1	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>2,354,194,692</b>					<b>2,589,634,748</b>
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	12 Bulan	100 persen	2,350,108,692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2,585,139,961



7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Laporan	100 persen	4,086,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4,494,787
7	1	1	2.05		Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah								48,256,800					53,088,750
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	50 Paket	100 persen	31,756,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	34,938,750
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	9 Orang	100 persen	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	18,150,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								169,092,100					186,366,350

7	1	1	2.06	1	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Presentasepemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	JumlahPaketKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan	Jumlahpemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	11 Paket	100 persen	13,587,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasepemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	100 persen	14,946,560
7	1	1	2.06	2	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentasepemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	JumlahPaket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlahpemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	32 Paket	100 persen	33,384,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasepemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	100 persen	36,726,113
7	1	1	2.06	3	PenyediaanPeralatanRumahTangga	Presentasepemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	JumlahPaket PeralatanRumahTangga yang Disediakan	Jumlahpemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	16 Paket	100 persen	22,083,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasepemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	100 persen	24,506,124
7	1	1	2.06	5	PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	Presentasepemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	JumlahPaket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlahpemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	7 Paket	100 persen	25,495,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentasepemenuhanadministrasiumpemerkat daerah	100 persen	28,145,246

7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	72 Dokumen	100 persen	43,251,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 persen	47,577,393
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Presentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1364 Orang	100 persen	31,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 persen	34,464,914
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>726,133,500</b>					<b>798,924,582</b>
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Unit	100 persen	89,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	98,494,000

7	1	1	2.07	5	PengadaanMebel	Presentasep emenuhanpengadaanbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	JumlahPaketMebel yang Disediakan	Jumlahpeme nuhanpengadaanbarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Paket	100 persen	60,487,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentas epemenu hanpengadaanbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	100 persen	66,550,000
7	1	1	2.07	6	PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	Presentasep emenuhanpengadaanbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	Jumlahpeme nuhanpengadaanbarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	2 Unit	100 persen	26,166,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentas epemenu hanpengadaanbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	100 persen	28,880,582
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Presentasep emenuhanpengadaanbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan	Jumlahpeme nuhanpengadaanbarang milikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	1 Paket	100 persen	549,999,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentas epemenu hanpengadaanbarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	100 persen	605,000,000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah								56,415,535					64,057,723

7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	12 Bulan	100 persen	23,711,385	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	28,082,883
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	12 Bulan	100 persen	32,704,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	35,974,840
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									60,053,350				66,066,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Unit	100 persen	31,459,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	34,606,000

7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasionala tauLapangan	Presentasep emenuhanpe meliharaanb arangmilikda erahpenunja ngurusanpe merintahand aerah	JumlahKenda raan Dinas Operasionala tauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkanP ajak dan Perizinannya	Jumlahpeme nuhanpemeli haraanbarangmilikdaerah penunjangur usanpemerintahandaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 persen	8 Unit	100 persen	28,593,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentas epemenu hanpemeli haraanb arangmilik daerahpe nunjangur usanpemerintahand aerah	100 persen	31,460,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								512,692,390				563,972,895	
7	1	2	2.01		KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan								283,130,300				311,454,000	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/SinergiPerencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahandanPerangkat Daerah dan InstansiVertikalTerkait	Persentasejumlahlaporan pelaksanaan koordinasi pe nyelengaraa nkegiatanpe merintahand i tingkatkecamatan	JumlahLaporanPelaksanaanKoordinasi Penyelengga raanKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlahlapor anpelaksana ankoordinasi penyelengga raankegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	105,590,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasejumlahlaporanpelaksanaankoordinasi penyeleng araankegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan	1 laporan	116,160,000

7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	177,539,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 laporan	195,294,000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								229,562,090				252,518,895
7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	42,562,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 laporan	46,818,895

7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjaperangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjaperangkat daerah yang ada di kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	186,999,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjaperangkat daerah yang ada di kecamatan	1 laporan	205,700,000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>86,301,000</b>				<b>95,146,715</b>
7	1	3	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								<b>24,967,300</b>				<b>27,500,000</b>
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiatan	1 laporan	9,996,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	11,000,000



7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegiatan	1 laporan	14,970,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,500,000
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									26,499,800				29,150,000	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	1 laporan	11,000,000
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	2 Kegiatan	1 laporan	16,499,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase jumlah laporan pemberdayaan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	1 laporan	18,150,000
7	1	3	2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)									34,833,900				38,496,715	

7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Dokumen	1 laporan	14,898,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16,496,715
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Dokumen	1 laporan	9,991,800			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	11,000,000
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Dokumen	1 laporan	9,943,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	11,000,000
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>188,577,000</b>					<b>207,435,139</b>
7	1	4	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>188,577,000</b>					<b>207,435,139</b>

7	1	4	2.01	1	Sinergitasde nganKepolisi an Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertik al di Wilayah Kecamatan	PersentaseP enangananG angguanTran tibusum	JumlahLapor an Hasil Sinergitasde nganKepolisi an Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVerti kal di Wilayah Kecamatan	JumlahPenan ganganGang guguanTrantibu m	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegi atan	1 Kegi atan	121,661,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas ePenanga nanGang guguanTranti busum	100 %	133,827,512
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungande nganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PersentaseP enangananG angguanTran tibusum	JumlahLapor anPelaksana anHarmonisa siHubungand enganTokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	JumlahPenan ganganGang guguanTrantibu m	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	100 %	1 Kegi atan	1 Kegi atan	66,915,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentas ePenanga nanGang guguanTranti busum	100 %	73,607,627
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								329,999,558				363,000,000
7	1	5	2.01		PenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmumSesuaiPenugasanKepala Daerah								329,999,558				363,000,000
7	1	5	2.01	1	PembinaanW awasanKeba ngsaan dan Ketahanan Nasional dalamrangka Memantapka	Persentaseju mlahlaporan penyelengga raanurusanp emerintahan	JumlahLapor anPenyeleng garaanUrusa nPemerintah anUmumSes	Jumlahlapor anpenyeleng garaanurusa npemerintah daerahsesuai	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Lapo ran	1 lapor an	142,999,558	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Persentas ejumlahla poranpen yelenggar aanurusa	1 lapora n	157,300,000

					nPengamala n Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBh inneka Tunggal lkasertaPeme rtahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KesatuanRep ublik Indonesia	umumsesuai penugasanke paladaerah	uaiPenugasa nKepala Daerah	penugasanke paladaerah						Umum		npemerin tahanumu msesuaip enugasan kepaladae rah		
7	1	5	2. 01	8	PelaksanaanT ugas Forum KoordinasiPi mpinan di Kecamatan	Persentaseju mlahlaporan penyelengga raanurusanp emerintahan umumsesuai penugasanke paladaerah	JumlahLapor anPenyeleng garaanUrusa nPemerintah an yang TidakDilaksa nakan oleh Unit KerjaPerangk at Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlahlapor anpenyeleng garaanurusa npemerintah daerahsesuai penugasanke paladaerah	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Lapo ran	1 lapor an	187,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas ejumlahla poranpen yelenggar aanurusa npemerin tahanumu msesuaip enugasan kepaladae rah	1 lapora n	205,700,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								120,193,200					56,394,305
7	1	6	2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahanDesa								120,193,200					56,394,305

7	1	6	2.01	1	FasilitasiPenyusunanPeraturanDesa dan PeraturanKepalaDesa	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahadesa	JumlahDokumen yang DifasilitasidalamrangkaPenyusunanPeraturanDesa dan PeraturanKepalaDesa	Jumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahadesa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	22,091,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahadesa	1 laporan	24,490,000
7	1	6	2.01	2	FasilitasiAdministrasi Tata PemerintahanDesa	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahadesa	JumlahDokumen yang DifasilitasidalamrangkaAdministrasi Tata PemerintahanDesa	Jumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahadesa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	8,456,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentasejumlahpelaksanaanfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahadesa	1 laporan	9,302,590

7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	1 Dokumen	1 laporan	50,173,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	12,921,715
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Garut, Cilawu, Cilawu	1 laporan	2 Kegiatan	1 laporan	39,471,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 laporan	9,680,000
TOTAL													4,666,068,725				5,059,665,231

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Cilawu mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Cilawu .menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Cilawu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI GARUT,**

**RUDI GUNAWAN**





## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Cilawu mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Cilawu .menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Cilawu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI GARUT,**

**RUDI GUNAWAN**









## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu dilakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Cilawu mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Cilawu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Cilawu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian



sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**